

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 963/705/V/BPKAD/2021

Tanggal, 24 November 2021

dan

NOMOR : 170/359/ DPRD / 2021

Tanggal, 24 November 2021

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**
Jabatan : BUPATI BARITO SELATAN
Alamat Kantor : Jl. Pelita Raya Nomor 305 F Buntok

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

2. a. Nama : **Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.
- b. Nama : **Hj. ENUNG IRAWATI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan
Alamat : Jl. Pahlawan No 325 Buntok.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas

belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan/Kegiatan dan rencana pembiayaan Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Buntok, 24 November 2021.

BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

EDDY RAYA SAMSURI

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M
K e t u a

Hj. ENUNG IRAWATI
Wakil Ketua

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 963/705/V/BPKAD/2021

Tanggal, 24 November 2021

dan

NOMOR : 170/359/ DPRD / 2021

Tanggal, 24 November 2021

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
BAB II KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	1
2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	1
2.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	1
BAB IV PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	1
4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	1
BAB V KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	1
BAB VI PENUTUP	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimum anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Selanjutnya rancangan KUA dan PPAS akan dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk menjadi KUA dan PPAS. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan rencana kegiatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota

yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun

- 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 13).

BAB II

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp1.002.010.164.746,13 Pendapatan Daerah tersebut apabila kita bandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp985.494.991.104,00 maka terlihat terjadi kenaikan sebesar Rp16.515.173.642,13 atau 1,68 persen.

Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Pendapatan Transfer; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, Pendapatan Transfer mengalami penurunan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap.

Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

2.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp98.065.794.810,13 bertambah sebesar Rp2.287.701.402,13 atau 2,39 persen dibanding dengan target tahun 2021 yaitu sebesar Rp95.778.093.408,00.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a)Pajak Hotel; b)Pajak Restoran; c)Pajak Hiburan; d)Pajak Reklame; e)Pajak Penerangan Jalan; f)Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g) Pajak Sarang Burung Walet; h) PBB; dan i) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.567.492.205,00 atau 39,19 persen menjadi Rp30.430.600.000,00 apabila dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp21.863.107.795,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 2) Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 3) Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 4) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp4.700.000.000,00.
- 5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dianggarkan sebesar Rp3.025.000.000,00 atau naik sebesar Rp267.492.205,00 dengan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp2.757.507.795,00.
- 6) Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp600.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 7) Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 8) BPHTB dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp3.000.000.000,00 bila dibandingkan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00.
- 9) Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2021.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000.000,00 bila dibandingkan yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Pasar-Kios; d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e) Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran; f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan h) Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah bangunan; b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan; c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor; d) Retribusi Tempat Pelelangan; e) Retribusi Terminal; f) Retribusi Tempat Khusus Parkir; g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; h) HewanRetribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan i) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada orang Pribadi; c) Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi; dan d) Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Orang pribadi.

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp7.133.961.684,00 mengalami penurunan sebesar Rp205.097.480,00 apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.339.059.164,00.

Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan sebesar Rp2.520.072.500,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.080.984.250,00. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp560.911.750,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp266.311.750,00 atau mengalami

penurunan sebesar Rp99.672.500,00 apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp365.984.250,00.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp74.600.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp37.900.000,00 apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp112.500.000,00.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.412.500.000,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.432.500.000,00.
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan kegiatan baru yang pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.558.049.934,00. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.233.074.914,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.324.975.020,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.391.387.934,00 naik sebesar Rp213.913.020,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.177.474.914,00.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.056.062.000,00 yang mana belum pernah dianggarkan pada Tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.000.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.000.000,00.

- 4) Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 dan tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 turun sebesar Rp9.000.000,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.000.000,00.
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.723.100.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp80.000.000,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp110.000.000,00.

Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.015.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.025.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp990.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.
- 3) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp15.000.000,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.209.260.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.251.534.669,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.957.726.131,00.

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan Modal Pada BUMD. Target tersebut bersumber terutama dari penerimaan Hasil Dividen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp10.209.260.800,00.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan ; 2) Jasa Giro; 3) Pendapatan Bunga; 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah; 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah; 7) Pendapatan dari Pengembalian; 8) Pendapatan BLUD; dan 9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp50.291.972.326,00 menurun sebesar Rp7.326.227.992,00 dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp57.618.200.318,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dianggarkan sebesar Rp607.239.472,00 mengalami penurunan sebesar Rp178.760.528,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp786.000.000,00.
- 2) Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp50.000.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000,00.
- 3) Pendapatan Bunga dianggarkan sebesar Rp4.500.482.999,00 mengalami penurunan sebesar Rp49.700.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.550.182.999,00.

- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.
- 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.000.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000,00.
- 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.
- 7) Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp1.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp657.500.000,00 dibanding dengan target tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.042.500.000,00.
- 8) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok dianggarkan sebesar Rp37.350.274.460,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.553.123.813,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.797.150.647,00.
- 9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dianggarkan sebesar Rp4.303.975.395,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.388.391.277,00 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.692.366.672,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp896.597.685.989,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp34.969.355.000,00 atau 4,06 persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp861.628.330.989,00 dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp34.969.355.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021

sebesar Rp828.404.599.000,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp863.373.954.000,00 yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp788.151.318.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.138.260.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp741.013.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp76.659.464.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.890.022.000,00 dibandingkan target Tahun Anggaran 2021 Rp58.769.412.000,00 terdiri dari:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp10.467.432.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.505.089.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.962.343.000,00.
- b. DBH PPh Pasal 21 pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp4.576.503.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp71.849.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.504.654.000,00.
- c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp196.378.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp143.360.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.018.000,00.
- d. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp52.828.915.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.817.444.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.011.471.000,00.
- e. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp52.828.915.000,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp11.817.444.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.011.471.000,00.

f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp1.918.826.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp790.507.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.128.319.000,00.

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp517.055.110.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.107.825.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp534.162.935.000,00.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp93.843.558.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.550.298.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.293.260.000,00.

a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Paud Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.239.347.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.699.635.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp539.712.000,00.

b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.088.794.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.814.369.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.274.425.000,00.

c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp12.914.216.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.729.567.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.184.649.000,00.

d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar

- Rp2.149.072.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.622.772.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp526.300.000,00.
- e. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.036.939.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp931.878.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.105.061.000,00.
 - f. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.786.957.000,00.
 - g. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.146.480.000,00.
 - h. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Reguler-KB Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp686.678.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.774.384.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.461.062.000,00.
 - i. DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp858.251.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp543.251.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp315.000.000,00.
 - j. DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan – Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.315.655.000,00.
 - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.501.773.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.585.024.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.086.797.000,00.
 - l. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.736.674.000,00.

- m. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.532.365.000,00.
 - n. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.987.741.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp402.331.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.585.410.000,00.
 - o. DAK Fisik-Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.862.616.000,00.
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp93.843.558.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.805.735.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.787.451.000,00. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdiri dari:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.764.780.000,00.
 - b. DAK Non Fisik-TPG PNSD Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp45.661.504.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.575.288.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.236.792.000,00.
 - c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.190.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.644.000.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp546.000.000,00.
 - d. DAK Non Fisik-TKG PNSD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.493.282.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp304.406.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.188.876.000,00.
 - e. DAK Non Fisik-BOP PAUD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.042.280.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.280.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.974.000.000,00.

- f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.193.970.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp286.470.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.907.500.000,00.
- g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.077.014.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.299.973.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.777.041.000,00.
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp406.876.000,00 menurun sebesar Rp62.234.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp469.110.000,00.
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp258.745.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.196.879.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.455.624.000,00.
- j. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp412.352.000,00.
- k. DAK Non Fisik-BOKB-KB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.989.783.000,00.
- l. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp102.600.000,00.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.659.236.000,00.

c. Dana Desa

Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp71.563.400.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.828.141.000,00 dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.391.541.000,00.

2.2 Pendapatan Transfer antar-Daerah

Pendapatan Transfer antar-Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.223.731.989,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021 yaitu:

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari : 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp14.159.263.661,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.833.483.308,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp8.367.726.339,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp37.900.288,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.825.358.393,00 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2021.

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2022 masih belum dianggarkan, sebagaimana juga pada asumsi APBD Tahun Anggaran 2021 yang lalu.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp7.346.683.947,00 menurun sebesar Rp20.471.882.760,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp28.088.566.707,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah.

3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp7.346.683.947,00 sama dengan Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri; 3) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 sama dengan target Tahun Anggaran 2021.
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri pada Tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,00 sama dengan target Tahun Anggaran 2021.
3. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp3.996.683.947,00 sama dengan target Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.1
Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2022

Jenis Penerimaan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Kenaikan/ (turun)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95.778.093.408,00	98.065.794.810,13	2,39 %
Pajak Daerah	21.863.107.795,00	30.430.600.000,00	39,19 %
Retribusi Daerah	7.339.059.164,00	7.133.961.683,75	(2,79) %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.957.726.131,00	10.209.260.800,00	13,97 %
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	57.618.200.318,00	50.291.972.326,38	(12,72) %
Pendapatan Transfer	861.628.330.989,00	896.597.685.989,00	4,06 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	828.404.599.000,00	863.373.954.000,00	4,22 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.223.731.989,00	33.223.731.989,00	0 %
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.088.566.707,00	7.346.683.947,00	(73,84) %
Pendapatan Hibah	7.346.683.947,00	7.346.683.947,00	0 %
JUMLAH PENDAPATAN	985.494.991.104,00	1.002.010.164.746,13	1,68 %

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan. Selain itu karena lokasi kegiatan dan penerima manfaat atau kelompok sasaran berada di wilayah kecamatan/desa, maka prioritas tersebut merupakan pembangunan se-Kabupaten Barito Selatan.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan untuk RKPD Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan terpilih merupakan kewenangan Kabupaten Barito Selatan.
2. Fokus pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Merupakan respon terhadap isu-isu strategis dan masalah mendesak pada masing-masing misi pembangunan faktual yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022.
5. Sesuai dengan pagu indikatif sementara.

Secara Nasional, sesuai tema RKP 2022 :”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 (tujuh) fokus pembangunan, yang meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Sedangkan untuk sasaran dan prioritas provinsi pada Tahun 2022 adalah:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan;
12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat”**.

Tema Pembangunan diatas, merupakan kelanjutan dari 5 (lima) tema pembangunan sebelumnya. Tema pembangunan tahun keenam ini memiliki makna bahwa setelah kita fokus untuk membenahan tata pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan ditunjang pengamalan agama untuk mencapai Barsel yang bermartabat.

Dalam rangka melaksanakan Tema Pembangunan tersebut pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Pemantapan pelayanan publik bidang infrastruktur wilayah akan dilakukan melalui kebijakan Pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti: jalan, jembatan, irigasi, jaringan PLN, jaringan telekomunikasi, perhubungan, sarana dan prasarana air bersih serta infrastruktur lainnya.
- 2) Pemantapan pelayanan publik bidang Pendidikan akan diarahkan untuk mendukung mantapnya sarana dan prasarana pendidikan termasuk guru dan tenaga kependidikan.
- 3) Pemantapan pelayanan publik bidang kesehatan dan Keluarga Berencana akan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca mewabahnya virus covid-19, penyediaan dan perluasan serta pemerataan jangkauan Layanan Keluarga Berencana (KB), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pencegahan Stunting dalam Program Pembangunan Keluarga serta Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 4) Pemantapan pelayanan publik bidang, pangan, pertanian, dan perikanan diarahkan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan stok pangan daerah menuju swasembada pangan.
- 5) Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan konsep 3A (Akses,

Amenitas, dan Atraksi) sektor pariwisata, didukung promosi dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas, Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi, Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya serta kesetaraan gender di instansi pemerintahan dan swasta, serta pemberdayaan ekonomi kreatif lewat UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

- 6) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama dengan prinsip saling menghormati menuju bermasyarakat yang aman dan tenteram.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah dan Peningkatan partisipasi publik melalui kebijakan Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis.
- 8) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN, kebijakan Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik, serta Reformasi Birokrasi di semua lini.

Tabel Sinergitas Program antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel Sinergitas Program antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Khusus untuk Tahun 2022, beberapa sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercermin dalam Program Prioritas masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

- I. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.
 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
 - A. Dinas Pendidikan yaitu :
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan.
 - 2) Program Pengembangan Kurikulum.
 - 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
 - A. Dinas Kesehatan yaitu :
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yaitu :
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - 6) Program Pengembangan Permukiman.
 - 7) Program Penataan Bangunan Gedung.
 - 8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - 9) Program Penyelenggaraan Jalan.
 - 10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Perumahan.
 - 2) Program Kawasan Permukiman.
 - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
 - A. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang Sosial.
 - A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :
 - 1) Program Penanggulangan Bencana.
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.
 - B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :
 - 1) Program Pemberdayaan Sosial.
 - 2) Program Rehabilitasi Sosial.
 - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - 4) Program Penanganan Bencana.
 - 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- II. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar.
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
 - A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :
 - 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja.
 - 4) Program Hubungan Industrial.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - 2) Program Perlindungan Perempuan.
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - 4) Program Perlindungan Khusus Anak.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
- A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :
- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
 - 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
- A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :
- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
 - 2) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian, Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
 - 3) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
 - 4) Program Penata Gunaan Tanah.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- A. Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - 5) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
 - 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

- 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- 9) Program Pengelolaan Persampahan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil.
 - A. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk.
 - 2) Program Pencatatan Sipil.
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :
 - 1) Program Penataan Desa.
 - 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
 - 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
 - 1) Program Pengendalian Penduduk.
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
 - A. Dinas Perhubungan.
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 2) Program Pengelolaan Pelayaran.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
 - A. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 2) Program aplikasi informatika.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
 - 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
 - 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 5) Program Pengembangan UKM.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.
 - A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal.
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
 - A. Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian.
 - A. Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
 - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:
 - 1) Program Pengembangan Kebudayaan.
 - 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
 - 3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - 4) Program Pengelolaan Permuseuman.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.

- A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :
 - 1) Program Pembinaan Perpustakaan.
- 18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
 - A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:
 - 1) Program Pengelolaan Arsip.
 - 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
- III. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
 - A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan yaitu:
 - 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata.
 - 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
 - 4) Program pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
 - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu:
 - 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 - 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
 - 5) Program Perizinan Usaha Pertanian.
 - 6) Program Penyuluhan Pertanian.
 - 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
 - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:
 - 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.

- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
 - 4) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
 - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:
 - 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
 - 2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
 - A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :
 - 1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
1. Sekretariat Daerah.
 - A. Sekretariat Daerah yaitu:
 - 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Program Perekonomian dan Pembangunan.
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:
 - 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
- V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
1. Perencanaan.
 - A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Keuangan.
 - A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 3. Kepegawaian.
 - A. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu:
 - 1) Program Kepegawaian Daerah.
 4. Penelitian dan Pengembangan.
 - A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

1. Inspektorat Daerah.

A. Inspektorat yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- 2) Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

VII. Unsur Kewilayahan.

1. Kecamatan.

A. Kecamatan Dusun Hilir yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Kecamatan Dusun Selatan yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

C. Kecamatan Dusun Utara yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

D. Kecamatan Gunung Bintang Awai yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

E. Kecamatan Jenamas yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

F. Kecamatan Karau Kuala yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

VIII. Unsur Pemerintahan Umum.

1. Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- 4) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

BAB IV

PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Adapun Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dibagi berdasarkan (1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pemerintahan Pilihan; (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (7) Unsur Kewilayahan; dan (8) Unsur Pemerintahan Umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Proyeksi Belanja Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp606.124.346.371,00 atau sebesar 59,44 % dari total belanja, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp266.599.208.962,00. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp176.401.218.322,00. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp141.365.407.300,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar

Rp7.063.738.731,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp14.193.773.056,00. Dilaksanakan oleh 1) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp501.000.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp147.547.321.668,00 atau sebesar 14,47% dari total belanja, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.988.175.456,00. Dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp324.806.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp17.048.118.314,00. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp141.914.710,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp9.380.830.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.618.346.057,00. Dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp66.297.136.038,00. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.768.379.486,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp11.431.321.912,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.677.294.890,00. Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.771.412.726,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.920.324.774,00. Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.371.652.413,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00. Dilaksanakan Oleh Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp186.856.950,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.453.766.062,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp81.985.880,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Proyeksi Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebesar Rp9.744.356.260,00 atau sebesar 0,96% dari total belanja, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.071.300.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp226.125.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.228.963.900,00. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp689.888.960,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp378.078.400,00. Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00. Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp55.050.761.315,00 atau sebesar 5,40%. meliputi 2 (dua) urusan yakni:

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.813.538.774,00. Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp29.237.222.541,00. Dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp164.819.940.795,00 atau sebesar 14,24% meliputi 4 (empat) urusan yakni:

a. Perencanaan

Perencanaan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.157.126.876,00. Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Keuangan

Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp151.508.901.214,00. Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

c. Kepegawaian

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.110.912.705,00. Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

d. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp43.000.000,00. Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.600.975.736,00 atau sebesar 0,75%. Dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

7. Unsur Kewilayahan

Belanja Unsur Kewilayahan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp23.888.969.083,00 atau sebesar 2,34%. Dilaksanakan oleh Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Hilir,

Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Jenamas, Kecamatan Gunung Bintang Awai, dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

8. Unsur Pemerintahan Umum

Belanja Unsur Pemerintahan Umum pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.933.493.518,00 atau sebesar 0,48%. Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022.

Adapun Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dibagi berdasarkan 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, 3) Belanja Bunga, 4) Belanja Subsidi, 5) Belanja Hibah, 6) Belanja Bantuan Sosial, 7) Belanja Modal, 8) Belanja Bagi Hasil, 9) Belanja Bantuan Keuangan dan 10) Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp431.039.145.296,00 pada Tahun Anggaran 2022.

2. Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp215.380839.387,00 pada Tahun Anggaran 2022.

3. Belanja Bunga.

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp1.247.640.986,00 pada Tahun Anggaran 2022.

4. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp683.742.010,00 pada Tahun Anggaran 2022.

5. Belanja Hibah.

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp30.554.809.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

6. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2022.

7. Belanja Modal.

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp178.382.213.785,00 pada Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari :

- a.** Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.785.398.485,00.
- b.** Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.135.514.000,00.
- c.** Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp93.410.301.300,00.
- d.** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.000.000,00.

8. Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp3.779.144.338,00 pada Tahun Anggaran 2022.

9. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp129.420.852.200,00 pada Tahun Anggaran 2022.

10. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp26.721.777.744,00 pada Tahun Anggaran 2022.

Rekapitulasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

BAB V

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pada Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya diperkirakan sebesar Rp80.000.000.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp12.300.000.000,00.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp50.000.000.000,00.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp80.000.000.000,00, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp62.300.000.000,00, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.700.000.000,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp17.700.000.000,00, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan surplus sebesar Rp17.700.000.000,00, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2022

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD.

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman utama dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan hasil pembahasan pada forum Musrenbang Kabupaten Barito Selatan tahun 2021. Dengan demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan komitmen seluruh stakeholder yang berisi rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan komitmen seluruh stakeholder, maka dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksud harus dijadikan pedoman bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyusunan rancangan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, serta menjadi acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, maka Bupati Barito Selatan akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk itu setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan secara berkala kepada Bupati Barito Selatan cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun berikutnya.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Buntok, 24 November 2021.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. H. M. FARID YUSRAN, M.M
K e t u a

BUPATI BARITO SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

EDDY RAYA SAMSURI

Hj. ENUNG IRAWATI
Wakil Ketua II

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas DUKCAPIL		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
53	Pemerataan Infrastruktur Wilayah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			

				DINAS PERHUBUNGAN	30.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	38.849.070
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			

				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	50.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

				BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	109.150.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

				KECAMATAN JENAMAS	220.000.000
				KECAMATAN KARAU KUALA	250.000.000
55	Stabilitas Ekonomi Daerah				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	36.412.000
57	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi				
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

				DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			

				DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	82.500.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			

				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	213.300.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

				DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	827.850.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			

				BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	69.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				

				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.475.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				KECAMATAN DUSUN HILIR	155.800.000	
				KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	92.760.000	
				KECAMATAN JENAMAS	41.200.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

				KECAMATAN DUSUN HILIR	30.564.000	
58	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

				DINAS PENDIDIKAN	432.653.000	
60	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				KECAMATAN DUSUN UTARA	25.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1) Peningkatan kualitas pendidikan						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

					DINAS PENDIDIKAN	432.653.000	
2	2) Peningkatan kualitas kesehatan						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS KESEHATAN	69.968.400	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

					KECAMATAN DUSUN HILIR	250.000.000	
					KECAMATAN DUSUN SELATAN	750.000.000	
					KECAMATAN DUSUN UTARA	250.000.000	
					KECAMATAN JENAMAS	250.000.000	
3	4) Penyediaan infrastruktur pendukung						

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.000.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	55.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	82.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	209.300.000	
			PROGRAM PENATAAN DESA				

					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	878.102.488	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	827.850.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	75.261.070		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

					BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.450.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	92.760.000		
4	5) Pengembangan Infrastruktur penunjang							

			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	63.900.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					

					DINAS PERHUBUNGAN	30.000.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					

					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	50.000.000		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					

					BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	69.000.000		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

					BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	43.150.000		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.475.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	

					KECAMATAN DUSUN HILIR	1.000.000		
					KECAMATAN DUSUN UTARA	115.846.824		
					KECAMATAN JENAMAS	75.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN DUSUN UTARA	30.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN DUSUN HILIR	30.564.000		
					KECAMATAN JENAMAS	220.000.000		
					KECAMATAN KARAU KUALA	250.000.000		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN DUSUN UTARA	10.000.000		
					KECAMATAN JENAMAS	10.000.000		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	266.599.208.962	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	266.599.208.962	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	266.599.208.962	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.901.894.692	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.909.400	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.909.400	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	198.294.131.602	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	198.294.131.602	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	418.993.000	
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	418.993.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.348.000	
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	210.348.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.837.920	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.173.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.891.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.249.920	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438.540.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	29.984.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.422.450	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.422.450	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.740.983.320	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.067.320	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.480.920.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.269.000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.154.500	
1.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.817.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.297.500	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.612.384.370	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.869.275.090	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	891.744.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	880.000.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.114.043.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.204.004.000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	697.661.000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	255.346.000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.495.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	217.699.940	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	540.380.960	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	49.999.820	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.292.289.700	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	322.292.710	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.358.814.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.999.960	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.716.933.280	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.900.000.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	300.000.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	320.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	350.000.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.838.976.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	323.095.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	205.240.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.997.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	164.905.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.408.254.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96.497.880	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	269.011.400	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	84.991.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.405.966.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.763.206.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	550.313.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.256.381.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	432.653.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	14.990.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.178.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	117.050.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	171.539.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.042.280.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.262.970.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	39.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.193.970.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	25.000.000	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	25.000.000	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	25.000.000	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	59.929.900	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	59.929.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	59.929.900	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	176.401.218.322	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	176.401.218.322	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	176.401.218.322	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.476.360.976	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.087.165	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.105.165	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.982.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.042.866.054	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.519.741.554	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.390.560.000	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.874.000	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.991.500	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	52.699.000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.999.920	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	74.999.920	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.303.000	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44.983.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.320.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.858.800	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.956.400	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.968.400	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.998.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.990.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.947.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.950.577	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.952.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.998.577	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.016.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.016.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	37.350.279.460	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.350.279.460	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60.175.729.516	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.914.238.560	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6.059.616.000	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	10.786.957.000	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	467.999.750	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	3.729.998.810	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.661.251.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.146.480.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.061.936.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.116.490.956	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.993.200	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.455.624.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	67.407.600	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.958.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.960.740	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	65.173.440	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	83.878.990	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	815.169.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	285.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	45.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.044.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	44.999.600	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	35.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	177.660.950	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.019.915.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2.744.366.245	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	17.725.903.395	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	334.999.796	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.026.437.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	20.000.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	85.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	85.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	529.109.460	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19.999.760	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19.999.760	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	325.168.860	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	325.168.860	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	183.940.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	183.940.840	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	135.018.370	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.000.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.018.370	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.018.370	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	141.365.407.300	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	141.365.407.300	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	141.365.407.300	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.765.654.300	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.831.397.252	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.227.597.252	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	446.200.000	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	157.600.000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.000.000	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.257.048	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.000.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.257.048	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.713.000.000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	765.600.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	892.400.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.641.741.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.694.000.000	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	200.000.000	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	800.000.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.950.000.000	
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	100.000.000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	644.000.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.947.741.000	
1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	9.847.741.000	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	100.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.641.674.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.641.674.000	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	540.000.000	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	315.000.000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	50.000.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.736.674.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	700.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	600.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.267.365.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.267.365.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.932.365.000	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	150.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	185.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.912.600.000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.912.600.000	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.912.600.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.531.200.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.531.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12.531.500.000	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.999.700.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.681.900.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.681.900.000	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	454.000.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.227.900.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	73.398.273.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	73.398.273.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.223.800.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	3.664.300.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	65.860.173.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	200.000.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.300.000.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	400.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	150.000.000	
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	600.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	825.000.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	190.000.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	190.000.000	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	212.700.000	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	42.200.000	
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	150.000.000	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	20.500.000	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	37.300.000	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	37.300.000	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	385.000.000	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	385.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	900.000.000	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	350.000.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	140.000.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	110.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	200.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.063.738.731	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.063.738.731	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.063.738.731	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.514.856.881	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.698.900	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.698.900	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.483.979.461	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.483.979.461	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.057.300	
1.04.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.057.300	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.800.200	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.750.000	
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.050.200	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.693.000	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.800.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.705.000	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.492.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.560.000	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.211.600	
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.924.400	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.535.486.820	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	857.926.820	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.390.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.600.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.141.200	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.141.200	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	48.000.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	23.000.000	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	23.000.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25.000.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	149.999.900	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.000.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	50.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	99.999.900	
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	99.999.900	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	350.881.950	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	350.881.950	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	22.910.800	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	118.497.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	209.473.650	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.193.773.056	
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.716.378.259	
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.716.378.259	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.640.428.309	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.310.008.259	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.310.008.259	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.420.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.420.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.000.050	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.000.050	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.542.559.200	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	397.139.200	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	229.500.200	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	37.639.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.000.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	40.000.000	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.145.420.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.750.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.091.920.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.750.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.533.390.750	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.533.390.750	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.528.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	52.652.900	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	378.360.700	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.074.849.150	
1.06.1.05.0.00.01.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.477.394.797	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.1.05.0.00.01.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.477.394.797	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.527.617.197	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.036.200	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.036.200	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.263.235.146	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.252.854.246	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.380.900	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.078.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.235.000	
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.843.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.418.048	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.463.348	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.574.700	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	104.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.140.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.310.970	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.310.970	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.958.333	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.098.333	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.260.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.580.500	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.534.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.296.500	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	594.859.750	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	45.000.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	20.000.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	249.859.750	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	20.000.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	30.000.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	124.859.750	
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	50.000.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.000.000	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	215.000.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	354.917.850	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.917.850	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.917.850	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	501.000.000	
1.06.2.13.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	501.000.000	
1.06.2.13.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	501.000.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	51.500.000	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	31.500.000	
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	31.500.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	122.900.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	75.000.000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	25.000.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	47.900.000	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	47.900.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	218.400.000	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	40.000.000	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	40.000.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	178.400.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.400.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	91.500.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	42.500.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	38.000.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	38.000.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	38.000.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	70.200.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	70.200.000	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	70.200.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.988.175.456	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.988.175.456	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.988.175.456	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.648.175.456	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.701.447.736	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.574.087.736	
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.180.000	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	117.180.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.800.000	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.800.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.440.320	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.693.000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.650.320	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.997.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.700.000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.900.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.980.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.520.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.294.000	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.624.000	
2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15.180.000	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.490.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.178.400	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.578.400	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.600.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
2.07.01.2.13	Penataan Organisasi	35.015.000	
2.07.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	35.015.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20.000.000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	20.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	90.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	65.000.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	45.000.000	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20.000.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.000.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.000.000	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	80.000.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	60.000.000	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	15.000.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	45.000.000	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	150.000.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.180.000	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.000.000	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	5.000.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	28.180.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	111.820.000	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.820.200	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.800	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	7.500.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	324.806.000	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	324.806.000	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	324.806.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.204.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.204.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.120.000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	25.084.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	39.715.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.722.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.722.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.993.000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.993.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99.835.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.495.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34.495.000	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.340.000	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.340.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	145.052.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.052.000	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.052.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	17.048.118.314	
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	17.048.118.314	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	17.048.118.314	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.651.518.314	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.484.550	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.034.350	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.450.200	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.679.733.801	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.554.733.801	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75.000.000	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.000.000	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.000.000	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	421.600.000	
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	421.600.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	984.526.923	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.200.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	652.326.923	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.173.040	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.173.040	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	42.600.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.600.000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	42.600.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	183.000.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	110.000.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	30.000.000	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	60.000.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	20.000.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	73.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	48.000.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	25.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	146.000.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.000.000	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	141.914.710	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	141.914.710	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	141.914.710	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	44.420.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.420.000	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.710.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.710.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	48.687.555	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.687.555	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	28.772.105	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	19.915.450	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	39.396.155	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	39.396.155	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	39.396.155	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	9.411.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	9.411.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	9.411.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.380.830.000	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.380.830.000	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.380.830.000	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.895.180.656	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.549.000	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.333.000	
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.216.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.747.447.536	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.747.447.536	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.659.120	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.949.760	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.560.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.400.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.250.000	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.499.360	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.986.000	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.386.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.100.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.539.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.857.500	
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.681.500	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	200.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	270.198.258	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	169.198.258	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30.000.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	59.312.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.886.258	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.000.000	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	76.000.000	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	76.000.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36.649.900	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	36.649.900	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.649.900	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	25.000.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.600.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	142.600.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.800.000	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	53.800.000	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	45.000.000	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	20.600.000	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	20.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	24.400.000	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	24.400.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	85.820.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.820.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	46.800.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	39.020.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.000.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	57.000.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	57.000.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	32.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.628.381.186	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.628.381.186	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	39.200.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	159.633.636	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.948.400.650	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	381.146.900	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.618.346.057	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.618.346.057	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.618.346.057	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.258.852.817	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.119.980	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.119.980	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.749.736.378	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.749.736.378	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.612.760	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.612.760	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.014.600.910	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.700	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.659.870	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.954.900	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.366.660	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.998.000	
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.319.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.935.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	307.367.780	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.841.050	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.850.000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.991.050	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.573.539	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.920.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.053.539	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.600.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.368.200	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.444.650	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.950.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.999.550	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.974.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	110.448.720	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	62.208.940	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	62.208.940	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	43.239.880	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	43.239.880	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	4.999.900	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	4.999.900	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	166.159.740	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	63.459.840	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	63.459.840	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	102.699.900	
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	102.699.900	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	82.884.780	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	82.884.780	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	32.484.820	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	50.399.960	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	66.297.136.038	
1.06.2.13.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	66.297.136.038	
1.06.2.13.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	66.297.136.038	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.116.071.350	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.441.487.100	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.392.307.100	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.180.000	
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.900.000	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.900.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.019.250	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.750.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.000.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.269.250	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.300.000	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	63.900.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.400.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.365.000	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.615.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.110.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.640.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.13.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	65.000.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
2.13.01.2.13	Penataan Organisasi	15.000.000	
2.13.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15.000.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	898.102.488	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	898.102.488	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	20.000.000	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	878.102.488	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25.000.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	25.000.000	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	58.889.802.200	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	58.889.802.200	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	70.000.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	57.682.452.200	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	100.000.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	40.000.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	827.850.000	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.000.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	50.000.000	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	20.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	34.500.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	368.160.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	368.160.000	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	268.160.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.000.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.768.379.486	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.768.379.486	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.768.379.486	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.546.980.686	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.088.420.286	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.926.720.286	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.700.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.857.400	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.702.400	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.755.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.400.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	686.678.000	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	686.678.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.381.400	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.687.400	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.694.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.643.600	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.643.600	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	75.352.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	55.357.000	
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	35.381.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	9.987.600	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	9.988.400	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19.995.000	
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	10.000.000	
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	9.995.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.069.790.250	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	243.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	243.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.433.620.000	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	88.800.000	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	798.405.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	546.415.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	134.420.250	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.412.700	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	80.007.550	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	258.750.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	258.750.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	76.256.550	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	41.507.400	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	41.507.400	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	34.749.150	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.929.150	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.970.000	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	9.850.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.431.321.912	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	11.431.321.912	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	11.431.321.912	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.943.121.912	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.043.825.312	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.043.825.312	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276.800.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	176.800.000	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	750.500.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.000.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.460.000.000	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.000.000	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.683.818.000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.218.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.505.600.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.178.600	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	578.178.600	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.918.200.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	360.000.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	280.000.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	80.000.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	20.000.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.058.200.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	978.200.000	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	390.000.000	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	130.000.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	210.000.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	70.000.000	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	570.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	
2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	480.000.000	
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	480.000.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.677.294.890	
2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.677.294.890	
2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.677.294.890	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.710.294.890	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.963.909.890	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.836.199.890	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.554.000	
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	95.156.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.290.000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.290.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.095.000	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.095.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.000.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	5.000.000	
2.16.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5.000.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.492.000.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.492.000.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	55.000.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	37.000.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	95.000.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.000.000.000	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	250.000.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	15.000.000	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	475.000.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	420.000.000	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	240.000.000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	52.000.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	43.000.000	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	15.000.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.771.412.726	
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	5.771.412.726	
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	5.771.412.726	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.483.897.026	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.777.290.856	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.633.490.856	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.800.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.412.000	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.412.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.426.070	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.847.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.849.070	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.230.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.214.366.000	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.100.000	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.066.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.117.200.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.402.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.800.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.777.100	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.825.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	36.999.640	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	36.999.640	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.999.780	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.999.860	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10.016.800	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.016.800	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.016.800	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	49.999.800	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.999.800	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	49.999.800	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	67.999.880	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	67.999.880	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.999.880	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	72.499.660	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	72.499.660	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	14.999.880	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.499.800	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	19.999.980	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	49.999.920	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	49.999.920	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	49.999.920	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.920.324.774	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.920.324.774	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.920.324.774	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.787.972.774	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.611.080.874	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.611.080.874	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.581.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.800.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.252.000	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.650.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.849.500	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.997.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.995.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.038.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.580.500	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.580.500	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640.579.900	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.640.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.179.900	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.760.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.150.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	320.000.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	260.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	60.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	60.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.000.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	310.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	310.000.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	150.000.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	80.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40.000.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	452.352.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	452.352.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	122.618.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	276.220.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	53.514.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.371.652.413	
2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.371.652.413	
2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.371.652.413	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.886.402.963	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.361.645	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.321.645	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.040.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.833.823.318	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.216.527.386	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	617.295.932	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.997.730	
2.19.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.997.730	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.220.270	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.000.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.220.270	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	423.348.500	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	423.348.500	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	176.916.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	246.432.500	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.900.950	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.984.150	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	20.984.150	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.913.800	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	10.910.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	10.003.800	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	20.003.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	20.003.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	60.000.000	
2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.000.000	
2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	60.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.000.000	
2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.000.000	
2.16.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.000.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	186.856.950	
2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	186.856.950	
2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	186.856.950	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	58.242.250	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.999.750	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	9.999.750	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.242.500	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	48.242.500	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	64.475.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.475.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	64.475.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	46.922.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	46.922.000	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	46.922.000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	17.217.700	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	17.217.700	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	17.217.700	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.453.766.062	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.453.766.062	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.453.766.062	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.230.887.482	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.603.500	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.600.800	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.002.700	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.284.046.974	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.046.974	
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.264.060	
2.23.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.264.060	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.766.000	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.550.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.216.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.416.726	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.420.206	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.339.600	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.401.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.982.920	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.079.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.194.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.406.222	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.004.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.151.802	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.250.420	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.218.384.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.312.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.149.072.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	222.878.580	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.272.500	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	32.243.300	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.780.800	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	39.157.820	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	23.958.220	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.132.360	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.606.080	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	42.062.800	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	32.543.280	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	81.985.880	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	81.985.880	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	81.985.880	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	81.985.880	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	23.299.960	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23.299.960	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	8.999.780	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	8.999.780	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	49.686.140	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	23.782.080	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25.904.060	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.071.300.000	
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.071.300.000	
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.071.300.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	398.500.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	95.500.000	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	30.500.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	65.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	208.000.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	168.000.000	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	25.000.000	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	15.000.000	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	85.000.000	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	85.000.000	
3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03.2.06.02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	10.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	509.800.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	245.000.000	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.000.000	
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	50.000.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80.000.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	264.800.000	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.000.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.800.000	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	54.000.000	
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	35.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.000.000	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	35.000.000	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	128.000.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	15.000.000	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	58.000.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	58.000.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	55.000.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	226.125.000	
2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	226.125.000	
2.19.3.26.2.22.01.0000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	226.125.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	45.000.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	45.000.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	45.000.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	116.125.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	116.125.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	56.125.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	20.000.000	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	10.000.000	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.000.000	
3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	10.000.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	55.000.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	30.000.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	30.000.000	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	25.000.000	
3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	25.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.228.963.900	
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.228.963.900	
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.228.963.900	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.232.818.900	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.516.255.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	62.600.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.453.655.000	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	627.540.400	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	290.830.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	112.310.400	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	224.400.000	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	98.803.500	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	98.803.500	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	624.720.000	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	45.000.000	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	397.050.000	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	182.670.000	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	365.500.000	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	365.500.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	140.000.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	40.000.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	40.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	100.000.000	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	100.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	277.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	227.000.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	227.000.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50.000.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	50.000.000	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	30.000.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	30.000.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.499.145.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.499.145.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.083.498.200	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	102.170.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	313.476.800	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	689.888.960	
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	689.888.960	
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	689.888.960	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	33.000.000	
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	33.000.000	
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	33.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	129.999.860	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84.999.860	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	84.999.860	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	45.000.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	406.000.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	381.000.000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	381.000.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	25.000.000	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	120.889.100	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	120.889.100	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	98.889.160	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.999.940	
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	12.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	378.078.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	378.078.400	
3.30.2.17.3.31.01.0000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	378.078.400	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	135.030.500	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	135.030.500	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	14.077.500	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	120.953.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	243.047.900	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	243.047.900	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	243.047.900	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	150.000.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000	
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	150.000.000	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	25.000.000	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	125.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	25.813.538.774	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	25.813.538.774	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	25.813.538.774	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.184.210.774	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.432.484.014	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.432.484.014	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.940.620.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	255.020.000	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.685.600.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.743.196.716	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.145.730	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.439.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.012.584	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	421.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.600.000	
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	406.999.402	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.797.024	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	867.231.024	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.487.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.079.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.168.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	935.878.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.600.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.690.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	614.000.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	440.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	174.000.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	330.000.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	105.000.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	70.000.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	155.000.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.419.945.020	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	404.970.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	414.990.820	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	599.984.200	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.724.018.700	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	729.874.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	159.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	300.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	270.874.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.771.544.700	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	992.224.700	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	453.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.326.320.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	222.600.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	114.398.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	30.800.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	77.402.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	905.309.300	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	200.571.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	58.511.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.500.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	52.560.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	380.599.300	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	140.000.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	101.117.900	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	139.481.400	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	258.214.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	61.079.400	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	34.998.800	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	162.135.800	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	65.925.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	26.048.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	16.570.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	23.307.000	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	29.237.222.541	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	29.237.222.541	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	29.237.222.541	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.537.374.541	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.550.032.977	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.485.152.977	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.880.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.840.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.840.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	915.685.250	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.044.500	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.453.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.800.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.167.750	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	107.220.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	850.321.600	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.321.600	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	742.000.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.308.805.800	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.045.800	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	808.760.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.920.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	559.920.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.636.303.914	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.268.453.914	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	280.250.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	87.600.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.341.465.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	367.435.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.974.030.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.699.848.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.118.943.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	643.943.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	475.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.266.845.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	556.000.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.710.845.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.669.510.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.599.850.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.069.660.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2.644.550.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.605.020.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	39.530.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	7.157.126.876	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.157.126.876	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.157.126.876	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.209.559.876	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.089.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.389.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.373.000	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.327.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.050.020.876	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.972.882.876	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.600.000	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.600.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.338.000	
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.600.000	
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.573.270	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.573.270	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.000.000	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.000.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.862.080	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.534.080	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.328.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.731.250	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.731.250	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.283.400	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.150.400	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.133.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.000.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	761.767.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	387.956.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.000.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	52.600.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	40.600.000	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	128.156.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	151.600.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	162.800.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	55.000.000	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	69.000.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	38.800.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	211.011.000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	120.411.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.600.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.185.800.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	338.990.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.600.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.400.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	48.000.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	55.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	126.990.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	386.910.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	113.380.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.250.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	47.000.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	106.000.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.030.000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.250.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	32.000.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	459.900.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.150.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.000.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	80.150.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	184.450.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	80.150.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	66.000.000	
5.02	KEUANGAN	151.508.901.214	
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	151.508.901.214	
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	151.508.901.214	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.649.528.328	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.020.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.990.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.040.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.990.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.413.914.628	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.088.817.008	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.739.760	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	158.357.860	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	184.328.550	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35.021.400	
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	149.307.150	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	66.813.500	
5.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	66.813.500	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.999.150	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	99.999.150	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.507.990	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.175.070	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.994.100	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.537.140	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.519.780	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.995.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.287.080	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.999.820	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.344.540	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.106.040	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.238.500	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797.193.550	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.463.840	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.759.710	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.970.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.627.140	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.034.800	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.592.340	
5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	293.779.280	
5.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	159.999.780	
5.02.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	133.779.500	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	108.351.260.778	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.108.493.050	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	46.300.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	45.473.350	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43.178.400	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	45.291.250	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	45.481.200	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100.000.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.000.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	131.696.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	323.304.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	93.721.350	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	84.047.500	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	649.287.400	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	61.896.600	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.000.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	108.399.850	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	54.999.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44.180.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	63.232.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	104.667.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	75.520.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	121.392.250	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	581.465.250	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	49.999.800	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	117.999.560	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	101.306.100	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.999.740	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	150.749.760	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	61.016.740	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	40.393.550	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106.012.015.078	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.247.640.986	
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	683.742.010	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	71.563.400.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	28.738.087.744	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.779.144.338	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	711.842.880	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	711.842.880	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	134.923.200	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	102.761.200	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	199.999.500	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	49.536.400	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	71.665.980	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	152.956.600	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.796.269.228	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.796.269.228	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	81.522.736	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	851.375.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	106.903.206	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50.050.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	133.232.606	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	314.372.170	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12.262.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	200.827.150	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	45.723.760	
5.03	KEPEGAWAIAN	6.110.912.705	
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.110.912.705	
5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.110.912.705	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.012.187.195	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.208.840	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.256.340	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.952.500	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.146.292.008	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.046.092.008	
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.200.000	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.719.700	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.931.700	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.788.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.154.151	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.930.851	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.859.300	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.200.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.164.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.565.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.565.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.099.996	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.499.996	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.600.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.147.500	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.950.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.702.500	
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.495.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.098.725.510	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	458.775.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	62.800.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	200.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.475.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	168.000.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	14.500.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	430.000.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	15.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	65.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	350.000.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.016.994.150	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50.000.000	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	767.294.400	
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	40.999.950	
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	59.999.800	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	28.700.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	40.000.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	192.956.360	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	53.759.950	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	22.500.210	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	27.499.850	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	74.196.350	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.000.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	43.000.000	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	43.000.000	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	43.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	43.000.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	43.000.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	43.000.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	7.600.975.736	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	7.600.975.736	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	7.600.975.736	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.961.775.736	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.794.685.736	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.774.685.736	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000.000	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.290.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.290.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.800.000	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.800.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.539.200.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.239.200.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	400.000.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	20.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	100.000.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	469.200.000	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	50.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100.000.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	300.000.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	250.000.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100.000.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	20.000.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	20.000.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	80.000.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30.000.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	23.888.969.083	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN DUSUN HILIR	3.003.472.615	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN DUSUN HILIR	3.003.472.615	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.139.583.615	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.723.872.615	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.718.872.615	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.871.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.976.000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.045.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.800.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	21.040.000	
7.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	21.040.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.300.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.300.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	800.589.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.589.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.564.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.025.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	500.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	250.000.000	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN DUSUN SELATAN	7.412.369.407	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN DUSUN SELATAN	7.412.369.407	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.404.618.573	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.733.744.838	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.733.744.838	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.049.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.300.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.969.500	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.780.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.159.735	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.759.735	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.664.500	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.600.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.064.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.007.750.834	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.061.050.834	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	403.510.014	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	647.540.820	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	196.700.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	196.700.000	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	750.000.000	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	750.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.598.921.097	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.598.921.097	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.753.197.097	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.846.824	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.846.824	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.925.550.273	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.875.550.273	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	188.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.000.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.800.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	755.724.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	353.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	152.724.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	147.724.000	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	250.000.000	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.000.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.320.580.760	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.320.580.760	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.197.389.280	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.267.874.970	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.175.114.970	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92.760.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.556.946	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.896	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.018.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.126.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.982.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.430.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.912.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.912.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.045.364	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.317.364	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.536.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113.021.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.530.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.530.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	77.491.500	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.491.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.069.980	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.069.980	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.069.980	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.100.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.100.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.100.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN JENAMAS	3.156.453.951	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN JENAMAS	3.156.453.951	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.356.453.951	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.424.973.951	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.973.951	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.880.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.880.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.600.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.200.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	690.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	220.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	250.000.000	
7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KARAU KUALA	3.397.171.253	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KARAU KUALA	3.397.171.253	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.598.446.253	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.874.043.413	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.874.043.413	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.525.160	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.911.160	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.214.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.270.000	
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	9.600.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.980.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.690.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.407.680	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.407.680	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.200.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.220.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.980.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	727.975.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	224.150.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125.850.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	127.975.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	127.975.000	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	250.000.000	
7.01.03.2.05.03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	250.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.750.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.750.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.750.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.933.493.518	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.933.493.518	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.933.493.518	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.889.148.128	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.250.000	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.250.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.254.245.518	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.245.518	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.393.410	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.877.100	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.527.750	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.707.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.891.500	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.390.060	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.259.200	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.059.200	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.200.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	123.814.250	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	123.814.250	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.000.000	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	23.310.000	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.508.250	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	29.856.000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	36.140.000	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.842.347.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.842.347.000	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.250.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.787.850.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.627.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.620.000	
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.949.800	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.949.800	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.250.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.699.800	
8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	59.234.340	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	59.234.340	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.549.780	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.234.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.449.960	

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	431.039.145.296
2	Belanja Barang dan Jasa	215.380.839.387
3	Belanja Bunga	1.247.640.986
4	Belanja Subsidi	683.742.010
5	Belanja Hibah	30.554.809.000
6	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000
7	BELANJA MODAL	178.382.213.785
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.785.398.485
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.135.514.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.410.301.300
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.000.000
8	Belanja Tidak Terduga	26.721.777.744
9	Belanja Bagi Hasil	3.779.144.338
10	Belanja Bantuan Keuangan	129.420.852.200
	TOTAL	1.019.710.164.746

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	80.000.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62.300.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	62.300.000.000	
	Pembiayaan Netto	17.700.000.000	